

BERPIJAK DI BUMI – BERPIHAK KEPADA MANUSIA (Mandat dari *Gaudium et Spes*)

Paul Budi Kleden

Abstract

Gaudium et Spes is a revolutionary document of Vatican II which can still inspire the Church now and in the future. This document is revolutionary in the sense that it deals with problems, issues and ideas that had never before become the agenda of any Council in the Catholic Church. Gaudium et Spes concretizes what John XXIII named aggiornamento, a process of contextualising the Christian heritage, through which the Church opens itself up to the modern world. This document is also revolutionary because it is entirely a product of the conciliar process of the Council itself. This article presents the process of drafting the document and discusses some issues that are relevant for the Church today and in the future.

Kata-kata kunci: proses, Gereja, dunia modern, solidaritas, keadilan ekonomi, martabat manusia, perdamaian.

Gaudium et Spes (GS) dapat disebut sebagai salah satu dari sejumlah kecil dokumen yang sepenuhnya dihasilkan dalam proses Konsili Vatikan II.¹ Selama masa persiapan konsili, belum ada rencana untuk menulis dokumen dengan tema seperti ini. Sebab itu, kalau kita berbicara mengenai apa yang terjadi setelah Vatikan II dalam kaitan dengan GS, maka salah satu tema penting mesti merujuk pada proses lahirnya dokumen itu sendiri. Inilah alasan, dalam artikel yang membahas isi dokumen tersebut dan pengaruhnya sampai kini, saya hendak berbicara terlebih dahulu mengenai semangat yang menjiwai lahirnya GS dan meneropong sejauh mana semangat tersebut masih mengarahkan Gereja Katolik pada masa ini.

Dari sekian banyak tema yang dibicarakan dalam GS – dokumen ini disebut juga sebagai keranjang untuk memuat semua tema yang tidak bisa dibicarakan secara khusus dalam dokumen-dokumen lain² – saya hanya mengambil empat: solidaritas, dialog, HAM dan

¹ Menurut kesaksian Benediktus XVI/Josef Ratzinger yang hadir dalam konsili sebagai peritus, sejak awal para peserta konsili sudah menunjukkan sikapnya yang tegas untuk menjadi subjek dari keseluruhan proses konsili. Mereka hendak merencanakan dan memutuskan sendiri apa yang terjadi dalam konsili. Sebab itu, daftar keanggotaan dalam komisi yang telah disiapkan panitia persiapan di Kuria pun ditolak. Kendati demikian, sebagian besar dokumen KV II meneruskan bahan yang telah disiapkan oleh panitia persiapan konsili. Hanya sedikit yang tidak disiapkan oleh panitia persiapan dan sepenuhnya lahir dalam proses konsili, seperti *Gaudium et Spes*, *Nostra Aetate* dan *Dignitatis Humanae* (bdk. Pidato Benediktus XVI pada pertemuan dengan para klerus Roma, 14 Februari 2013, <http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-reflection-on-vatican-ii-part-1-4>, diakses tanggal 20 Februari 2013.

² Draft ini “menjadi semacam bahtera Nuh di mana untuk sementara orang menempatkan semua tema yang tidak mendapat tempat di dalam draf lain” (Charles Moeller, “Die Geschichte der

perdamaian. Keempat tema ini mengalir dan menentukan bidang-bidang yang disinggung di dalam GS, seperti dunia sosial, ekonomi, politik dan budaya. Keempat tema ini mendesak sikap dan keprihatinan Gereja dewasa ini kalau dia mempertimbangkan posisinya dalam relasi dengan dunia sosial, ekonomi, politik dan budaya.

1. Kelahiran Sebagai Kemenangan Proses

Setelah mengumumkan rencana penyelenggaraan Konsili Vatikan II (KV II) pada tanggal 25 Januari 1959, Yohanes XXIII membentuk komisi-komisi yang mempersiapkan dokumen kerja. Dari masukan yang dikirim para uskup, fakultas teologi dan Kuria di Roma, disusun 70 skema. Menariknya, hanya satu dari ke-70 tema ini berkaitan dengan masalah sosial di dunia sebagai satu keprihatinan Gereja. Hal ini cukup mengejutkan, karena sebenarnya tema Gereja dan dunia dapat disebut sebagai dua soal utama dalam sejarah pemikiran Yohanes XXIII dan sudah beberapa kali disampaikan. Dalam kotbahnya pada hari Pentakosta 1960 Paus mengatakan: “setiap orang beriman ... sejauh dia adalah orang Katolik, serentak merupakan warga dunia ini, sebagaimana Kristus adalah penebus seluruh dunia”.³ Ketika menyampaikan pidato radio pada tanggal 11 September 1962, Yohanes XXIII berbicara mengenai tugas *ad intra* dan *ad extra* Gereja. Gereja perlu membarui struktur dan semangat serta merumuskan kembali ajarannya untuk memberi tuntutan kepada umatnya sendiri. Namun, Gereja pun perlu menata diri agar memenuhi tanggungjawabnya demi transformasi dunia menuju kondisi yang lebih baik. Paus menyebut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Gereja seperti kesejahteraan semua bangsa, kekudusan keluarga, tanggung jawab sosial, perhatian kepada negara-negara berkembang di mana Gereja mesti tampil terutama sebagai “Gereja kaum miskin”, kesenjangan dalam kehidupan sosial, kebebasan beragama, perdamaian antarbangsa. Tema-tema ini kemudian menjadi bagian dari GS.⁴ Kedua ensiklik pertama Yohanes XXIII, *Mater et Magistra* dan *Pacem in Terris*, juga merupakan bukti arah pemikirannya. Sebab itu, tidak munculnya tema ini sebagai satu tema sentral dalam persiapan konsili bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian paus.

Hal di atas terutama disebabkan oleh birokrasi Kuria Vatikan yang masih merasa asing dengan tema ini dan mencemaskan berbagai eskalasi yang dapat terjadi dalam konsili. Tema hubungan Gereja dan dunia disederhanakan menjadi persoalan sosial dunia. Belum ada kehendak untuk mendalami secara lebih serius posisi dan peran dunia bagi Gereja. Dunia sebagai *locus theologicus* belum terlintas di benak para pejabat Kuria Roma. Karena itu, tidak ada rencana untuk menjadikannya satu tema dari satu dokumen khusus konsili. Masalah sosial dunia pun hanya menjadi salah satu dari banyak tema lain yang ditugaskan untuk dua komisi, yaitu komisi teologi dan komisi kerasulan awam.⁵ Dari

Pastoralkonstitution”, dalam Heinrich Suso cs (eds.), *Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare*, Freiburg: Herder 1968, hlm. 261).

³ *Ibid.*, hlm. 242.

⁴ *Ibid.*, hlm. 245. Pidato ini sebenarnya sangat kuat dipengaruhi oleh Kardinal Suenens, uskup Mecheln, Belgia. Suenens kemudian sangat penting dalam menentukan arah seluruh konsili, khususnya dalam membidani kelahiran GS (hlm 245-246).

⁵ Kendati berbicara mengenai awam, pada awalnya subkomisi ini tidak memiliki seorang awam pun sebagai anggotanya. Baru kemudian diundang beberapa awam untuk terlibat dalam pembahasan draft dokumen (*ibid.*, hlm. 246).

pembagian ini pula dapat dilihat pandangan pada waktu itu, bahwa yang berurusan dengan dunia adalah para awam, bukan masalah Gereja.

Tidak adanya dokumen yang disiapkan untuk membicarakan tema Gereja dalam dunia dewasa ini menjadi sebab kritik dan protes sejumlah uskup. Secara khusus patut disebutkan nama Dom Helder Camara yang saat itu adalah uskup pembantu di Rio de Janeiro. Dia merasa terganggu karena semua dokumen konsili terlalu memusatkan perhatian pada masalah internal Gereja. “Apakah kita mesti menghabiskan seluruh waktu kita hanya untuk mendiskusikan persoalan internal Gereja, sementara dua pertiga umat manusia mati karena kelaparan? Apakah yang bisa kita katakan berkaitan dengan masalah keterbelakangan? Akankah konsili mengungkapkan keprihatinannya berkenaan dengan masalah-masalah besar umat manusia? Mestikah kita membiarkan paus sendirian dalam perjuangan ini?” Pemetaan dan penentuan prioritas masalah menjadi penting. Helder Camara menantang para uskup ketika dalam sebuah ceramah selama masa sidang pertama konsili dia menanyakan secara retorik: “Apakah persoalan terbesar Gereja Amerika Latin adalah kekurangan imam? Bukan! Persoalan terbesar adalah keterbelakangan.”⁶

Terinspirasi oleh ungkapan “Gereja kaum miskin” yang digunakan Yohanes XXIII dalam pidato radio 11 September 1962 dan desakan-desakan seperti yang dikatakan Dom Helder, beberapa kardinal, uskup dan teolog mulai mendesak agar dibentuk sebuah komisi khusus yang mendalami tema Gereja dan dunia. Salah satu di antaranya adalah Montini, yang kemudian terpilih sebagai Paus menggantikan Yohanes XXIII. Melalui kardinal Suenens dan Montini, kelompok ini menganjurkan seluruh dokumen konsili dibagi dalam dua kategori: *ad intra* dan *ad extra*. Di satu pihak dibutuhkan dokumen yang berbicara mengenai pembaruan Gereja ke dalam, tetapi pada pihak lain Gereja pun perlu dan dinantikan untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan di dunia umumnya.⁷ Usul ini diterima. Dengan ini jalan untuk merancang sebuah dokumen tersendiri mengenai peran Gereja dalam dunia modern terbuka.

Berdasarkan kesepakatan yang didukung sepenuhnya oleh Yohanes XXIII ini, dibentuklah sebuah komisi yang menyusun rancangan teks. Komisi ini membagi rancangan dalam dua bagian. Bagian pertama lebih bersifat teologis, memberikan pendasaran yang diperlukan, sementara pada bagian kedua dibicarakan anjuran-anjuran praktis. Hal lain yang juga penting adalah masalah bahasa yang digunakan untuk dokumen ini. Pada tahun 1963 Yohanes XXIII menerbitkan ensklik *Pacem in Terris*, dan ditengarai bahwa tanggapan luas dari berbagai kalangan di luar Gereja terhadap dokumen ini sangat dipengaruhi oleh bahasa dan gaya pembahasannya. Sebab itu, dokumen tentang Gereja dan dunia pun hendak dirumuskan dalam bahasa yang digunakan dalam *Pacem in Terris*, yakni menceritakan situasi yang sedang dialami sebelum memberikan beberapa pandangan teologis-biblis dalam bahasa yang mudah dipahami publik luas. Dokumen dimulai dengan penuturan dan analisis sederhana atas realitas, sebelum masuk ke dalam tanggapan berdasarkan ajaran Gereja dari kekayaan Kitab Suci dan tradisi.

Dalam perjalanannya, komisi ini pun menyertakan sejumlah awam. Mulanya, 14 dari 23 yang diundang dapat hadir untuk terlibat dalam diskusi. Ada tiga awam diundang sebagai

⁶ *Ibid.*, hlm. 247.

⁷ Kardinal Suenens menyampaikan anjuran ini kepada pleno konsili pada tanggal 4 Desember 1962, sehari sesudahnya Montini memperkuat anjuran tersebut.

pengamat, salah satunya adalah seorang perempuan, R. Goldie.⁸ Di samping memberikan masukan penting tentang isi, sumbangan para awam ini sangat berarti ketika berbicara mengenai gaya perumusan. Mereka menolak gaya yang mereka sebut „sistematik Jerman” dan mengusulkan gaya narasi biblis mengenai kenyataan yang dihadapi.⁹ Dengan ini, bahasa naratif dengan pemaparan kenyataan tetap dipertahankan. Walaupun demikian, dokumen ini tidak ditulis sebagai sebuah telaah sosiologis. Metode yang digunakan lebih tepat disebut sebagai metode pedagogis.¹⁰ Penentuan bahasa dan cara pendekatan ini penting karena dokumen ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Katolik tetapi kepada semua orang.

Tidak hanya itu, komisi pun berdialog dengan para teolog Protestan. Lukas Vischer dari komisi *Faith and Order* dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia memberikan masukan yang penting bagi komisi yang sedang mempersiapkan dokumen tentang Gereja dan dunia. Di samping pandangan teologis yang memperdalam makna harapan kristiani bagi dunia, masukan ini pun penting untuk merumuskan secara lebih jelas beberapa sikap terhadap masalah aktual, seperti persenjataan, negara-negara berkembang dan kebebasan beragama. Dalam rancangan yang dikenal sebagai dokumen Zuerich, kontribusi dari pihak Protestan ini diolah dan turut mempengaruhi perumusan. Rancangan ini merumuskan untuk pertama kalinya bagian pertama dokumen dengan pengertian mengenai partisipasi Gereja dalam kegembiraan dan harapan umat manusia.¹¹

Keterbukaan terhadap kontribusi gagasan dari Gereja-Gereja lain ini pun mendorong Gereja Katolik, sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Zuerich, untuk mengakui dan menghargai apa saja yang baik yang telah dilakukan Gereja-Gereja dan agama-agama lain dalam kaitan dengan usaha mengatasi permasalahan umat manusia. Gereja Katolik menyatakan kesadarannya bahwa dia bukan yang pertama dan satu-satunya yang memiliki keprihatinan bagi manusia dan persoalannya.¹² Kerjasama teologis diperlukan untuk mempertajam pandangan mengenai manusia sebagai gambar diri Allah, dan solidaritas lintas batas konvensi dan agama dibutuhkan untuk mempromosikan nilai dan martabat keluarga dan anak-anak, kebudayaan, dialog antaragama, perdamaian, kerjasama internasional dan pengentasan umat manusia dari kemiskinan. Apa yang menjadi panggilan Gereja dalam dunia dewasa ini, sebenarnya merupakan panggilan bagi semua manusia, terutama umat berbagai Gereja Kristen dan agama-agama lain.

⁸ Kehadiran para awam ini mulai terjadi pada bulan April 1963. Namun, masih ada sejumlah uskup dan kardinal yang tidak menyetujui partisipasi mereka, dengan alasan, konsili akan kehilangan statusnya sebagai organ mengajar Gereja apabila awam pun terlibat di dalamnya. Sebab itu, misalnya, ketika membahas masalah dogmatis dari rancangan dokumen, para awam tidak diikutsertakan (*Ibid.*, hlm. 249). Dalam sidang komisi persiapan dari November 1964 sampai Januari 1965 sejumlah perempuan awam dan Suster diundang sebagai pendengar, setelah soal ini diputuskan sendiri oleh Paulus VI pada tanggal 24 September 1964 (*Ibid.*, hlm. 264).

⁹ *Ibid.*, hlm. 258.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 272.

¹¹ Draft Zuerich dimulai dengan rumusan: „Kegembiraan dan duka, harapan dan kecemasan manusia masa ini, terutama mereka yang menderita ...”. Dalam rumusan terakhir kegembiraan dan harapan disebut lebih dahulu sebelum duka dan kecemasan (Charles Moeller, „Das Prooemium, Komentar”, dalam Heinrich Suso cs (eds.), *Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare*, Freiburg: Herder 1968, hlm. 284.)

¹² Charles Moeller, *Die Geschichte*, *op.cit.*, hlm. 255-256. Masukan ini merupakan salah satu pendorong untuk menyetujui penulisan satu dokumen khusus mengenai kebebasan beragama (Charles Moeller, 258).

GS tidak hanya merupakan produk para uskup dan teolog Eropa Barat. Menanggapi kritikan terhadap rancangan dokumen ini pada tahap tertentu karena dinilai “terlampau berbau Eropa (Barat)”,¹³ konsili memutuskan untuk menambah ke dalam tim kecil penyusun draft beberapa anggota dari luar Eropa Barat. Diangkatlah uskup Fernandes dari India, Satoshi Nagae dari Jepang, Zoa dari Afrika, Camara dari Brasilia, Wojtyla dari Polandia, Edelby dari Siria dibantu oleh teolog Gamurru dan Gregory dari Brasilia serta Galilea dan Medina dari Cile.¹⁴ Atas nama para uskup Polandia, Wojtyla, yang kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II, menekankan pentingnya pembicaraan mengenai tema kebebasan dalam kaitan dengan ateisme dan marxisme.¹⁵

Selain persoalan isi dan bahasa, satu tema lain yang mendapat perhatian besar para peserta konsili adalah status dari dokumen ini. Sejak munculnya draft Zuerich, komisi persiapan menawarkan status *Constitutio Pastoralis* (Konstitusi Pastoral) untuk dokumen ini. Usul ini mendapat tanggapan luas karena belum pernah di dalam sejarah ada dokumen dengan genus seperti itu. Karena berbicara mengenai masalah-masalah dunia yang ditandai oleh perubahan yang cepat, ada yang menganjurkan agar dokumen ini mendapat status sebuah deklarasi (*declaratio pastoralis*). Usul lain adalah memberi dua status berbeda kepada dua bagian berbeda dari dokumen: bagian pertama yang bersifat teologis berstatus konstitusi, sedangkan bagian kedua yang berisi anjuran praktis menjadi sebuah deklarasi. Namun, usul ini hanya menegaskan penilaian bahwa bagian kedua yang secara langsung menyentuh persoalan dua pertiga umat manusia, mendapat penilaian lebih rendah daripada spekulasi teologis yang memberikan kepuasan kepada Gereja sendiri. Pada akhirnya, setelah melewati berbagai perdebatan dan revisi yang berulang, pada tanggal 7 Desember 1965, sehari menjelang penutupan konsili, seluruh isi dokumen diterima dengan judul Gereja dalam Dunia Modern, dikenal *Gaudium et Spes* karena kedua kata pertama dari alinea pertamanya, dengan status sebagai sebuah konstitusi pastoral. Dengan demikian, selain konstitusi dogmatis tentang wahyu dan tentang Gereja, dan konstitusi mengenai liturgi, kita mendapat konstitusi keempat, tentang Gereja dalam dunia modern.¹⁶ Dimensi *ad extra* yang ditekankan Yohanes XXIII mendapat perhatian sepantasnya.

Pembagian GS dalam dua bagian tidak bermaksud menjadikan bagian kedua hanya sebagai aplikasi dari bagian pertama. Gagasan-gagasan teologis pada bagian pertama bukanlah penjelasan tentang wahyu yang bersifat kekal, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dan praktis dalam bagian kedua. Kedua bagian ini merupakan satu kesatuan. Dengan gagasan-gagasan dasar pada bagian pertama GS, KV II hendak menggarisbawahi kebutuhan sekaligus kemungkinan bagi Gereja untuk membicarakan masalah-masalah sosial yang selalu bersifat sementara dalam sebuah konstitusi. Dengan ini menjadi jelas bahwa Gereja sungguh lahir di dunia, ditempatkan di tengah dunia dan berbicara untuk dan kepada dunia. Gereja berada di dalam dunia dan masuk ke dalam dialog dengan umat manusia untuk berbicara tentang berbagai keunggulan, keprihatinan, tantangan dan

¹³ Demikian komentar dari Kardinal Lercaro, bdk. *ibid.*, hlm.262.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 264.262.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁶ Eric Borgman menyebut GS sebagai epitome dari Vatikan II (*Gaudium et Spes: the Forgotten Future of the Revolutionary Document*, dalam *Concilium* 2005, hlm. 48.)

peluang yang terdapat di dalam dunia. Gereja tidak menemukan Tuhan di luar dunia lalu membawanya ke dunia, melainkan melalui pergumulan di tengah dan bersama dunia.¹⁷

Proses sebagaimana yang terjadi selama Vatikan II sulit diulangi dalam perkembangan selanjutnya. Pada tingkat Gereja universal, berbagai sinode para uskup yang terjadi setelah Vatikan II memang dilaksanakan dalam proses, namun proses ini berada di bawah pengawasan ketat Kuria Vatikan.¹⁸ Kontrol yang ketat tidak memungkinkan sinode mengambil dinamika sendiri seperti yang terjadi selama Vatikan II. Sinode umumnya diawali dengan pengiriman *lineamenta*, semacam catatan awal tentang tema yang perlu ditanggapi para konferensi uskup dan lembaga-lembaga Gereja serta fakultas-fakultas teologi. Dari tanggapan ini disusun *instrumentum laboris* yang menjadi pegangan selama sinode. Tentu saja dalam kedua hal ini Kuria dibantu oleh para teolog.

Pada saat sinode sedang berlangsung, dibuat sebuah pernyataan kepada umat beriman. Di dalamnya para peserta sinode menyampaikan beberapa gagasan dasar mengenai sinode. Akhir sinode ditandai dengan penyerahan saran peserta kepada Paus. Namun, pernyataan akhir yang menyusuli sinode dan menjadi dokumen resmi hasil sinode dirumuskan oleh Paus. Dengan cara seperti ini, bukan mustahil dan memang sudah berulang terjadi bahwa gagasan-gagasan bernas dan berdaya transformatif yang dimunculkan di dalam sinode tidak mendapat tempat di dalam rumusan akhir dalam bentuk ensiklik yang dikeluarkan pasca sinode. Berbeda dengan dokumen konsili yang dihasilkan dari perdebatan dan pengambilan keputusan melalui voting, hasil sinode disampaikan dalam bentuk anjuran kepada Paus. Paus sendirilah yang memiliki hak prerogatif untuk memaklumkan isi sinode dan menentukan bentuk yang digunakan untuk itu.

Pergeseran ini terutama disebabkan oleh pandangan yang bergeser mengenai status para uskup setempat sebagai pemimpin Gereja lokal. Apabila di dalam proses dan sebagaimana dituangkan di dalam dokumen KV II, Gereja-Gereja lokal dilihat sebagai wadah yang mencerminkan Gereja sejagad, maka di dalam KHK, Gereja lokal hanya dilihat sebagai bagian dari Gereja universal, dengan pandangan seperti, Gereja lokal hanya melaksanakan apa yang diputuskan Gereja universal. Dan para uskup, kendati dapat diundang untuk berdiskusi bersama dalam kesempatan sebagaimana sebuah sinode, namun pada akhirnya mereka adalah pendengar apa yang dianggap baik dan tepat oleh Gereja universal. LG 27 menyebut para uskup sebagai „wakil dan duta dari Kristus”, namun dalam perkembangan lanjutnya, mereka lebih banyak dilihat dan diperlakukan sebagai wakil dan utusan Paus.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁸ Sejak tahun 1967 sampai 2012 telah dilangsungkan 25 kali sinode, 12 di antaranya adalah sinode khusus, seperti sinode tentang Afrika pada tahun 2009. Kalau dirata-ratakan, setiap 1,8 tahun diselenggarakan satu sinode. Ini jauh lebih sering dari sinode-sinode pada tingkat keuskupan, yang biasanya dilangsungkan setiap 5-10 tahun. Bdk.

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sinodo_indice_en.html.

Diunduh pada tanggal 21 Januari 2013.

¹⁹ KHK hanya menggunakan sebutan wakil Kristus bagi paus (KHK 331), sementara LG secara eksplisit menggunakannya juga untuk para uskup. Sejak tahun 1987 para uskup, sebelum ditahbiskan, diwajibkan untuk membuat sumpah kesetiaan kepada Paus. Dengan ini, relasi para uskup dengan Paus disamakan dengan relasi seorang vikaris jenderal dengan uskupnya (bdk. Hervé Legrand, “Forty Years Later: What has become of the Reforms?” dalam *Concilium* 2005, hlm. 62-63).

Perdebatan mengenai peran konferensi para uskup²⁰ juga menunjukkan pandangan dasar Vatikan yang menempatkan para pemimpin Gereja lokal sebagai kepala cabang dari Gereja universal, yang terlampau mudah diidentikkan dengan Gereja Roma. Jika kenyataan selama berlangsungnya KV II dan rumusan dalam LG 23 menunjukkan posisi konferensi para uskup sebagai ungkapan yang absah dari kejamakan situasi Gereja, maka dalam perkembangan selanjutnya dikeluarkan berbagai ketentuan yang memangkas kewenangan mengajar konferensi para uskup.²¹ Sebuah keputusan konferensi para uskup hanya memiliki otoritas mengajar apabila tanpa kecuali semua uskup yang menjadi anggotanya setuju dengannya, atau, apabila hanya 2/3 uskup setuju dengannya, Paus sendiri memberikan restu kepadanya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sebuah konferensi para uskup tidak memiliki kewenangan tersebut dalam dirinya.²²

Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa bahasa dan cara pendekatan GS kemudian menjadi semacam model yang digunakan untuk menyampaikan keprihatinan Gereja terhadap masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Baik dokumen-dokumen Gereja universal maupun konferensi para uskup dan pernyataan-pernyataan dari para uskup semakin menyertakan deskripsi dan analisis sosial sebagai bagiannya. Lingkaran pastoral yang digunakan dalam nota-nota pastoral KWI dapat dilihat sebagai salah satu contohnya. Gereja tidak lagi mendiktekan satu ajaran, melainkan memberikan pandangan dan mengajak orang untuk melibatkan diri dalam diskusi yang serius untuk masalah yang sungguh menyentuh kepentingan banyak orang.

2. Beberapa Tema Aktual

KV II menggarisbawahi dasar dan urgensi intervensi Gereja dalam masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi. Masih selama berlangsungnya konsili Yohanes XXIII mengeluarkan *Pacem in Terris* yang berbicara tentang martabat manusia yang menjadi dasar bagi tuntutan akan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Paulus VI berbicara kepada sidang umum PBB dan membuka satu langkah penting bagi Gereja. Gereja tidak hanya berbicara mengenai masalah dunia di dalam ruangan sidangnya sendiri, melainkan hadir di tengah percaturan gagasan mengenai persoalan-persoalan dunia. Demikian pula, diskusi dengan para ilmuwan dan seniman, para buruh dan petani mendapat perhatian Gereja. Pada tahun 1966 Paus Paulus VI membentuk komisi Keadilan dan Perdamaian untuk menanggapi seruan konsili akan pentingnya sebuah badan bagi Gereja universal yang menangani secara khusus masalah-masalah keadilan dan perdamaian.²³ Sinode para

²⁰ Diskusi ini terutama dipicu oleh surat gembala para uskup Amerika Serikat tentang perdamaian pada tahun 1983. Pada tahun yang sama, kongregasi iman di bawah Kardinal Josef Ratzinger mengeluarkan sebuah dokumen yang mengatakan dengan tegas bahwa konferensi para uskup tidak memiliki *mandatum docendi* (kewenangan mengajar), sebab kewenangan ini hanya dimiliki masing-masing uskup atau kolegium para uskup dalam persatuannya dengan paus. Dokumen mengenai status teologis dan yuridis konferensi para uskup yang dikeluarkan kongregasi para uskup di bawah pimpinan kardinal Gantin pada tahun 1988 pada prinsipnya menegaskan hal yang sama (bdk. Francis A. Sullivan, "Development in theological teaching authority since Vatican II", dalam *Theological Studies*, 73/3/September 2012, hlm. 571-574).

²¹ Tiga dokumen KV II berbicara mengenai konferensi para uskup: SC 22,36,39, CD 38; LG 23.

²² Hervé Legrand menyebutkan beberapa dokumen yang berbicara mengenai tendensi ini: Instruksi tentang Sinode-sinode Keuskupan (1997), *Apostolos suos dan Ad tuendam fidem* (1997), *Communio notio* (1992). Bdk. juga Francis A. Sullivan, *op.cit.*, hlm. 571-574.

²³ Charles Moeller, *Die Geschichte*, *op.cit.*, hlm. 275.

uskup tentang keadilan pada tahun 1971 menghasilkan dokumen *Iustitia in Mundo*, yang menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan merupakan bagian yang utuh dari evangelisasi. Dapat dikatakan, pada paruh kedua tahun 1960-an sampai akhir 1970-an, Gereja Katolik menjadi partner yang dapat diandalkan kalau orang berbicara mengenai persoalan-persoalan dunia.²⁴ Gereja-Gereja lokal pun menjadi semakin terlibat dalam masalah yang menyentuh langsung kehidupan umat dan warga. Tidak hanya di Amerika Latin, di Amerika Utara, Afrika dan Asia pun hal yang sama terjadi. Beberapa contoh akan disebutkan dalam uraian berikut.

2.1. Solidaritas

Alinea pertama GS adalah ungkapan yang puitis serentak kaya makna dari gagasan solidaritas. Gereja berbela rasa dengan umat manusia dan dunia. Apa yang dirasakan dan dialami umat manusia dalam ziarahnya di dunia, merupakan bagian dari perasaan dan pengalaman Gereja. Bukan lagi kepentingannya sendiri, kepastian akan hak-haknya serta kecemasan akan status dan penerimaan atas dirinya, yang menjadi hal mendasar bagi Gereja, melainkan apa yang menjadi keprihatinan dan persoalan yang mengganggu perdamaian seluruh umat manusia. Gereja tidak lagi melayani dirinya sendiri.²⁵ Identifikasi ini bukanlah sebuah aksi sekunder, seolah Gereja datang sebagai relawan dari sebuah wilayah aman bencana untuk membantu para korban di sebuah wilayah yang baru saja mengalami bencana. Solidaritas ini adalah bagian dari ciri Gereja, karena dia berada di dalam dunia. Solidaritas merupakan ungkapan bahwa Gereja ada di tengah dunia, dipengaruhi oleh dunia dan turut mempengaruhi dunia. Gereja memasang pundaknya untuk turut memikul tanggung jawab bagi dunia serentak ikut menjadi korban dari konspirasi kekuasaan dunia.

Salah satu pernyataan solidaritas yang sangat tegas dan jelas sudah muncul menjelang berakhirnya KV II, ketika pada tanggal 16 November 1965, 40 uskup menandatangani apa yang kemudian disebut sebagai Pakta Katakombe. Di katakombe Domittila para uskup itu menyatakan tekadnya untuk hidup tanpa segala macam simbol dan gelar yang berkonotasi kekuasaan dan kemewahan. Menurut pakta tersebut, solidaritas bukan hanya sebuah perjuangan demi orang-orang miskin dan terpinggirkan, melainkan gaya hidup yang sungguh mengambil bagian dalam kenyataan mereka.²⁶

Menurut Jon Sobrino, semangat solidaritas KV II yang dirumuskan secara sangat radikal di dalam Pakta Katakombe tersebut, menjadi inspirasi yang menjiwai sekurang-kurangnya kedua musyawarah umum CELAM, di Medellin dan Puebla.²⁷ Para uskup peserta musyawarah tersebut merefleksikan kemiskinan mereka dan keuskupan mereka masing-masing, kemudian merumuskan tekad solidaritas ini dalam dua dokumen yang diberi judul *Keadilan* dan *Perdamaian*. Dengan ini Gereja Amerika Latin keluar dari kemapanan yang dialaminya karena statusnya sebagai mayoritas. Berdiri pada pihak

²⁴ Eric Borgman, *op.cit* hlm. 51-52.

²⁵ Martin Maier, "Vatican II: Inspiration and Encouragement for the Church in Europe", dalam *Concilium* 2012, hlm. 124.

²⁶ Baca Paul Budi Kleden, "Radikalitas yang Inspiratif: Membaca Pakta Katakombe Para Uskup", dalam *Berbagi* 2/1/2013, hlm. 44-61.

²⁷ Menurut Sobrino, teks ini sangat kuat berpengaruh di Medellin (John Sobrino, "The 'Church of the Poor' did not Prosper at Vatican II" dalam *Concilium* 2012, hlm. 77.

orang-orang miskin dan lemah berarti berani menanggung risiko menjadi sasaran kebencian dan target kemarahan kelompok yang mulai terganggu kemapanannya. Kondisi seperti ini melahirkan Gereja orang-orang miskin yang bersatu dalam perjuangan. Umat yang miskin bersama para pemimpinnya berani menantang struktur ketidakadilan dan mendorong perubahan. Situasi seperti ini melahirkan para martir Amerika Latin dan menampilkan para uskup yang berani seperti Romero, Pedro Casaldaliga, Erwin Kräutler. Walaupun mendapat ancaman serius dari para penguasa politik dan tekanan dari Vatikan, mereka tetap tegak berdiri dan lantang bersuara. Yang patut pula dicatat sebagai satu kenyataan sejarah yang membesarkan hati adalah, bahwa konferensi para uskup Brasil memberi tanggapan keras atas instruksi Vatikan *On Some Aspects of the Theology of Liberation* (Agustus 1984). Karena sikap tidak tunduk seperti ini, yang hanya mungkin karena sejumlah uskup yang menghadiri KV II masih hidup, maka Vatikan harus merevisi sikapnya dan menerbitkan dokumen lain pada tahun 1986.²⁸

Inspirasi solidaritas yang diembuskan oleh proses dan isi GS tentu tidak hanya berpengaruh di Amerika Latin dengan gagasan teologi pembebasan. Felix Wilfred menulis bahwa tidak ada satu pun dokumen yang demikian relevan untuk misi di Asia seperti GS. Kendati GS tidak berbicara mengenai misi, namun semangat yang menjiwai GS sungguh penting bagi misi di Asia. Semangat itu adalah solidaritas. Gereja tidak mengajar dari satu posisi serba tahu, tetapi dengan segala kejujuran menempatkan diri di tengah dunia, belajar bersama semua mengenal dan memahami tanda-tanda zaman, dan dalam kerja sama dengan semua yang berkehendak baik Gereja hendak memberi tanggapan untuk mengatasi permasalahan dunia.²⁹ Tanggapan itu muncul antara lain dalam solidaritas dengan orang-orang miskin. Gereja Asia adalah Gereja orang-orang miskin, maka pantaslah kalau dialog dengan para miskin menjadi salah satu prioritasnya.³⁰ Jika Gereja Amerika Latin mengenal sejumlah uskup yang lantang dalam berbicara dan terpecaya dalam sikap yang konsisten, Gereja Asia dapat menyebut sejumlah nama yang bergema luas karena komitmennya yang tegas bagi orang-orang miskin, seperti Teresa dari Kalkulta, Y. B. Mangunwijaya dari Indonesia, atau Benigno Beltran dari Filipina.

Ketika Amerika Serikat merayakan dua ratus tahun eksistensinya sebagai negara, para uskup mengambil kesempatan untuk membuat refleksi mengenai kontribusi Gereja bagi kehidupan masyarakat Amerika. Menggunakan perayaan nasional sebagai kesempatan untuk membuat permenungan mengenai relasi Gereja dan masyarakat/negara dapat dilihat sebagai satu pengaruh dari GS.³¹ Konferensi yang disebut *Call to action* dihasilkan setelah melewati proses persiapan yang memakan waktu sekitar dua tahun dan bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan KV II tentang keadilan sosial. Di dalam konferensi tersebut dibicarakan mengenai persoalan rasisme, seksisme, militarisme dan ketidakadilan ekonomi. Tema-tema ini dan banyak tema lain menyentuh persoalan Gereja sendiri. Akibatnya, perlahan-lahan para uskup mulai mengambil jarak dari kelompok-kelompok yang dibentuk setelah konferensi.³²

²⁸ Josè Oscar Beozzo, "Vatican II Fifty Years Later in Latin America and the Caribbean", dalam *Concilium* 2012, hlm. 111.

²⁹ Felix Wilfred, "The Reception of Vatican II in a Multireligious Continent", dalam *Concilium* 2012, hlm. 118-119.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

³¹ Mary E. Hines, "North America 'Impulses' following Vatican II" dalam *Concilium* 2012, hlm. 103.

³² *Ibid.*, hlm. 107.

Dalam nafas solidaritas tersebut, Gereja Katolik Jerman menyelenggarakan musyawarah umat Katolik pada tahun 1975/76 yang menghasilkan sebuah dokumen yang berjudul: *Unsere Hoffnung, Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit* (Harapan Kita, Sebuah Pengakuan Iman pada Zaman Kita). Kuat dipengaruhi oleh sejumlah uskup yang hadir dalam konsili dan didukung oleh para teolog berpikiran maju seperti Rahner dan Metz, Gereja Jerman merefleksikan posisi dan perannya bagi upaya bersama mengubah kondisi kehidupan bagian terbesar umat manusia yang hidup dalam kemiskinan. Secara sadar Gereja Jerman – dan kita bisa mengatakan hal yang sama untuk Gereja Eropa Barat dan Amerika Utara – menyadari dan mengakui keterlibatannya dalam sistem politik dan ekonomi yang menghasilkan pendepakan sebagian besar umat manusia dari meja kesejahteraan. Dari kesadaran ini muncul berbagai tekad dan inisiatif untuk turut mengatasi permasalahan umat manusia. Salah satunya adalah bentuk-bentuk kerjasama antarparoki dan keuskupan dengan paroki atau keuskupan di berbagai belahan bumi. Melalui kerekanaan (*Partnerschaft*) ini hendak dicapai relasi saling memperkaya secara mutualistik.

Solidaritas membuat orang semakin sadar akan partisipasinya dalam penciptaan kondisi yang memungkinkan pihak lain terpenjara. Kesadaran ini kemudian melahirkan pengakuan akan keterlibatan. Kerangka ini dapat digunakan untuk membaca langkah Yohanes Paulus II yang mengakui kesalahan para anggota Gereja dan menyampaikan permohonan maaf atasnya. Berbela rasa dengan dunia berarti dengan berani dan jujur mengakui kesalahan masa lalu, baik dalam bentuk tindak aktif dalam ketidakadilan maupun dalam bentuk keengganan atau kelalaian untuk mencegah kejahatan. Kendati permohonan maaf ini dikritisi karena hanya berbicara mengenai ketidakadilan para putera/i Gereja dan bukan Gereja sendiri, namun fakta bahwa pemimpin atau pelayan tertinggi Gereja, Paus, meminta maaf secara publik merupakan satu tanda yang penting dari solidaritas. Masalahnya, setelah permintaan maaf tersebut Gereja masih tetap menjalankan kebiasaannya mencabut hak mengajar atau malah mengancam mengekskomunikasikan sejumlah teolog yang dipandang terlalu maju dalam dialognya dengan dunia. Sementara pada waktu yang sama Gereja membuka pintu dialog yang luas kepada kelompok-kelompok kanan yang konservatif.

2.2. Keadilan Ekonomi

Karena pemihakannya terhadap 2/3 umat manusia yang hidup dalam kemiskinan, KV II tidak bisa tidak berbicara mengenai masalah ekonomi. Sejalan dengan dokumen-dokumen ajaran sosial Gereja sebelumnya, Gereja dalam KV II menegaskan bahwa dia tidak memiliki kompetensi untuk mempromosikan satu sistem ekonomi tertentu. Tugasnya adalah menunjukkan prinsip-prinsip ekonomi yang mesti diperhatikan, dan dengan ini secara tidak langsung menyampaikan kritik terhadap sistem perekonomian yang sedang berlaku. Terhadap kedua sistem ekonomi yang dominan dalam sejarah kontemporer: sosialisme dan kapitalisme/neoliberalisme, Gereja mempunyai catatan-catatan kritis yang tajam.³³

GS (63-72) maupun berbagai dokumen yang muncul setelahnya, menegaskan sejumlah prinsip Katolik bagi perekonomian, seperti pengakuan akan hak atas milik pribadi serentak penegasan akan makna sosial dari harta milik tersebut. Kerja baik sebagai cara

³³ Rodger Charles dan Drostan Maclaren, *The Social Teaching of Vatican II. Its Origin and Development*, Oxford: Plater Publications, San Fransisco: Ignatius Press 1982, hlm. 296-299.

halal untuk mendapatkan upah maupun sebagai jalan perwujudan diri mendapat perhatian besar. Sebagai imbalan dari kerja, mesti ada jaminan bahwa orang mendapatkan upah yang memungkinkan dirinya dan mereka yang menjadi tanggungannya hidup secara layak sebagai manusia. Ensiklik *Laborem Exercens* dari Yohanes Paulus II memaparkan secara luas pandangan ini. Kerja merupakan salah satu hak asasi manusia, sebab melaluinya orang mengembangkan diri dan menghayati secara penuh kemanusiaannya. Itu berarti, kerja bukanlah siksaan, dan hidup tanpa kerja bukanlah ideal yang pantas bagi manusia. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin regulasi yang memungkinkan setiap warga mendapatkan pekerjaan.

Berbicara mengenai ekonomi pada masa sekarang berarti mendiskusikan investasi. GS 71 menandakan pandangan Gereja bahwa tujuan investasi adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin pendapatan yang memadai baik bagi orang-orang yang hidup dan bekerja sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan ini investasi ekonomi dihadapkan pada dua tanggung jawab yang tampaknya semakin aktual dewasa ini. Di satu pihak kemajuan ekonomi mesti memperhatikan dimensi keadilan dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan yang adil.³⁴ Hal ini bertabrakan dengan ideologi neoliberalisme yang bertumpu pada penumpukan kekayaan dan peningkatan profit dengan cara memangkas sebanyak mungkin biaya produksi, dan elemen biaya produksi yang paling mudah dipangkas adalah tenaga kerja. “Rasionalisasi” dijalankan dengan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan hal ini dinilai sebagai langkah untuk menyehatkan perusahaan. Pada pihak lain, investasi mesti dapat dipertanggungjawabkan dari segi dampaknya bagi generasi yang akan datang. Solidaritas lintas generasi menjadi satu tema yang semakin penting. Hal ini terutama berkaitan dengan masalah lingkungan. Investasi yang mengeksploitasi alam dan meninggalkan limbah yang merusak alam untuk jangka waktu yang panjang perlu dicegah.

Tema perekonomian yang dibangun di atas investasi yang adil baik secara generasional maupun lintas generasional mendapat tempat sentral dalam ensiklik *Caritas in Veritate* dari Benediktus XVI pada tahun 2009.³⁵ Ensiklik ini ditulis dengan latar belakang krisis ekonomi mondial pada tahun 2008 dan seterusnya. Perekonomian mengalami krisis besar karena dibangun di atas dasar ketamakan yang tidak terkendali. Karena obsesi untuk memenuhi ketamakan tersebut para pengusaha mempengaruhi pemerintahan negara-negara. Supremasi politik sering kalah di hadapan kepentingan peningkatan keuntungan para pemilik modal. Korupsi dan ilegalitas terjadi di mana-mana, baik di negara-negara maju maupun negara-negara miskin. Paus menyatakan secara tegas bahwa di antara para pelanggar hak-hak dasar dari para pekerja adalah perusahaan-perusahaan multinasional (22). Dengan cara seperti ini orang mengabaikan prinsip paling dasar dari setiap usaha ekonomi, bahwa modal paling dasar yang mesti dijaga dan dinilai tinggi adalah manusia, pribadi manusia dalam keutuhannya (25).

Keadilan ekonomi baik dalam arti pemerataan distribusi untuk memperoleh lapangan kerja dan mendapat gaji yang memadai maupun tanggung jawab lintas generasi serta kepedulian terhadap alam merupakan tuntutan yang mesti dipenuhi demi menjamin perdamaian dunia. Kesadaran ini perlu semakin diperluas dan dilembagakan, karena di satu pihak kita berhadapan dengan kenyataan meluasnya kesadaran warga akan hak-hak

³⁴ *Ibid.*, hlm. 319-330.

³⁵ Benediktus XVI, *Caritas in Veritate*, 2009. Selanjutnya pada akhir kutipan dari ensiklik ini dicantumkan nomor yang merujuk pada artikel dalam ensiklik tersebut.

dasar mereka, tetapi di lain kita menyaksikan pemangkasan hak-hak tersebut secara jelas oleh pemerintahan negara-negara yang sering hanya merupakan boneka mainan dari perusahaan-perusahaan. Sebab itu, Benediktus XVI mengingatkan: “Lebih lanjut, dalam era global ini, pemberantasan kelaparan telah menjadi satu tuntutan untuk menjamin keadilan dan stabilitas di atas planet kita. Kelaparan bukan terutama disebabkan oleh kurangnya bahan-bahan material, tetapi karena kurangnya sumber daya sosial, yang paling utama darinya adalah yang bersifat kelembagaan. Dengan kata lain, yang kurang adalah jaringan kerja sama dari lembaga-lembaga ekonomi yang sanggup menjamin akses yang teratur untuk mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, dan juga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan keperluan-keperluan yang muncul berhubungan dengan krisis pangan yang sungguh, karena tidak adanya tanggung jawab politis, baik secara nasional maupun internasional.”(27)

Pada tingkat Gereja universal, kritik terhadap ekonomi neoliberal ini menjadi tema dari dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian yang berjudul *Vocation of the Business Leader. A Reflection*.³⁶ Dalam era neoliberalisme, tampaknya modal mengalami semacam kebebasan yang tidak dimiliki sebelumnya. Keuntungan tidak lagi diperhitungkan bagi dan dipertanggungjawabkan kepada warga di mana sebuah usaha dilaksanakan. Dunia usaha semacam berada di sebuah wilayah tanpa tuan. Pemerintah nasional tidak memiliki banyak instrumen untuk mengontrol perilaku dunia bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan transnasional menjalankan usahanya di wilayah yang paling memungkinkan mereka mengeluarkan biaya produksi serendah mungkin serentak mendaftarkan diri di negara yang menawarkan keringanan pajak setinggi mungkin. Karena alasan ini, kini perusahaan-perusahaan multinasional “dapat memproduksi barang-barang di satu negara, membayar pajak di negara lain, dan meminta bantuan dan menuntut kontribusi dari negara ketiga”. (8)

Pada tingkat regional dan nasional suara kritis seperti ini sudah dikumandangkan secara lantang oleh para Uskup Amerika Latin dalam musyawarah mereka sejak di Medellin 1968. Tuntutan pemerataan keadilan dan akses terhadap sarana material kesejahteraan mendorong para uskup untuk membuat pernyataan tegas dan mengambil sikap radikal. Tuntutan *land reform* disuarakan secara keras. Sebab, penguasaan lahan secara tidak proporsional oleh sekelompok kecil warga sementara yang lain berada dalam posisi ketergantungan yang tidak berdaya, merupakan satu sebab kemiskinan yang mesti diatasi. Diperlukan satu model baru pembagian tanah sebagai satu modal utama untuk hidup dan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Untuk negara-negara maju Surat Gembala Sosial para Uskup Amerika Serikat yang berjudul *Economic Justice for All* (1988), juga Pernyataan Bersama Para Uskup Katolik dan Protestan Jerman yang berjudul *Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit* (1997) serta Surat Gembala Sosial Para Uskup Austria (1990) menyatakan secara tegas ketidakadilan sistematis yang terkandung di dalam sistem ekonomi kapitalistik/neoliberal. Surat-surat gembala ini umumnya lahir setelah melewati proses konsultasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Terlepas dari isinya yang memang sangat maju dalam soal perumusan hak para pekerja dan tanggung jawab para pemilik modal, proses yang ditempuh memungkinkan perluasan kesadaran bahwa Gereja

³⁶ Pontifical Council for Justice and Peace, *Vocation of the Business Leader. A Reflection*, Roma: Pontifical Council for Justice and Peace, 2012. Untuk selanjutnya dicantumkan nomor pada akhir setiap kutipan dari dokumen ini.

memang mesti dan memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada para penyelenggara tata ekonomi. Dokumen-dokumen ini umumnya menggunakan metode, yang kendati masih belum sistematis, sudah terkandung di dalam GS. Orang melibatkan sosiologi dan analisis sosial, untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai lingkaran pastoral yang terdiri dari tiga elemen dasar: membaca, menilai dan menentukan agenda tindakan.

Nota Pastoral KWI 2006 adalah versi Indonesia dari kontribusi gagasan untuk merefleksikan sistem dan praktik perekonomian di negara ini. Obsesi pemerintah pada investor besar, khususnya dari luar negeri, sebenarnya merupakan satu strategi yang tidak tepat sasaran sebab kehidupan perekonomian bangsa ini sebagian besarnya didukung oleh para pengusaha kecil dan menengah. Mega proyek yang mengandalkan para investor besar umumnya sangat rentan terhadap fluktuasi situasi ekonomi internasional, sementara yang terbukti bertahan pada masa krisis ekonomi mondial adalah usaha-usaha kecil dan menengah.

Hal yang paling menantang di dalam kondisi ini adalah: Bagaimana menjadikan bermanfaat dan bergema kekayaan pandangan Gereja mengenai keadilan ekonomi? Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian mengambil langkah mengajak para pebisnis untuk melakukan refleksi mengenai usaha mereka sendiri. Mereka tidak terutama didorong untuk memberikan sumbangan bagi lembaga-lembaga Gereja, tetapi untuk menilai sendiri sejauh mana usaha mereka dibangun di atas dasar prinsip keadilan. Tiga pertanyaan yang meringkas 30 pertanyaan yang diajukan kepada para pebisnis itu berbunyi: “Sebagai seorang pemimpin bisnis kristiani, apakah saya sedang mempromosikan martabat manusia dan kesejahteraan bersama dalam lingkup pengaruh saya? Apakah saya turut mendukung satu budaya kehidupan, keadilan, regulasi internasional, transparansi, standar-standar sipil, lingkungan dan para buruh, dan apakah saya turut mendukung perjuangan melawan korupsi? Apakah saya ikut mempromosikan perkembangan yang integral dari mereka yang menjadi rekan kerjaku?”³⁷ Mereka tidak ditanya tentang berapa sumbangan mereka pada tahbisan uskup atau berapa sering mereka ikut berziarah.

KWI dalam Nota Pastoral 2006 menawarkan dua jalan penting, di antara sejumlah yang lain. Yang pertama adalah koperasi kredit sebagai bentuk perekonomian di mana rakyat mengalami diri sebagai pemilik satu lembaga keuangan. Keutamaan koperasi kredit seperti ini tentu saja hanya bisa dipertahankan selama beberapa pengandaian seperti jumlah anggota dan jenis usaha diperhatikan secara sungguh-sungguh. Jika tidak, koperasi kredit hanya menjadi satu tampilan yang memamerkan bendera kerakyatan untuk menutupi satu kooptasi ekonomi neoliberal. Yang kedua adalah pelibatan para cendekia dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mendiskusikan persoalan keadilan perekonomian. Mestinya Gereja sendiri menjadikan diskusi mengenai etika ekonomi sebagai satu bagian wajib bagi para mahasiswa/i yang berkuliah pada universitas-universitas yang dikelola lembaga-lembaga gerejani.

2.3. Martabat Manusia dan HAM

Salah satu prestasi dari GS adalah meletakkan dasar teologis tentang pengakuan akan keluhuran martabat manusia dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM). Walaupun teks ini dinilai kurang mendasarkan gagasannya pada Kitab Suci, namun langkah penting

³⁷ Pontifical Council for Justice and Peace, *Vocation of the Business Leader. A Reflection*, Appendix, hlm. 26-27.

yang diambilnya tetap merupakan satu kontribusi penting bagi pemahaman dan praktik perjuangan demi penegakan HAM dalam lingkup Gereja Katolik.³⁸

GS 12 mengatakan, “Kitab Suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan seturut ‘citra Allah’, dengan kesanggupan untuk mengetahui dan mengasihi penciptanya, dan ditempatkan oleh penciptanya untuk menguasai dan melayani seluruh ciptaan lainnya demi kemuliaan Tuhan”. Dasar martabat manusia terletak dalam keyakinan bahwa dia diciptakan secara istimewa sesuai citra diri Allah sendiri. Dari konsep tentang manusia sebagai gambar Allah, berkembang pandangan bahwa dasar terdalam dari hak-hak asasi manusia adalah pengakuan atas hak Allah atas manusia sebagai gambar diri-Nya sendiri. Hak asasi Allah atas manusia melindungi manusia, khususnya mereka yang terlampau lemah dan tidak berdaya untuk dipandang memiliki hak dalam dirinya sendiri.

Dimensi lain yang terus dikembangkan sejak GS adalah pengakuan akan martabat yang sama bagi semua manusia, apapun ras, agama, jenis kelamin dan penampilan fisiknya, kecakapan intelektual dan kualitas moral mereka (GS 29). Yang berkembang sangat pesat dari keyakinan ini adalah pengakuan dan perjuangan untuk menegakkan HAM bagi kaum perempuan, yang dalam banyak masyarakat masih diperlakukan sebagai manusia kelas dua. Pernyataan ini pun menggarisbawahi semua bentuk usaha untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang-orang cacat fisik dan mental.

Selain teologi penciptaan yang dikembangkan sebagai pendasaran HAM, teologi perjanjian pun dilihat sebagai bingkai untuk mempertanggungjawabkan pandangan mengenai keluhuran martabat manusia dan keharusan keterlibatan Gereja dalam penegakan HAM.³⁹ Gagasan ini sudah disebutkan dalam GS 32. Tuhan adalah Allah persekutuan yang membuat perjanjian dengan umat manusia dan melindungi agar satu anggota persekutuan tidak melanggar apa yang menjadi hak anggota yang lain. Dekalog dibaca sebagai kodeks perjanjian. Dengan menetapkan sejumlah larangan, Allah mencegah pelanggaran hak atas hidup dan keutuhan tubuh, hak untuk membentuk dan memelihara keluarga, hak atas milik pribadi dari egoisme, ketamakan dan kesewenang-wenangan. Gagasan perjanjian yang menjamin martabat manusia dan HAM dipertegas dalam Perjanjian Baru. Di dalam diri Kristus yang menjadi manusia Tuhan menunjukkan keluhuran martabat manusia. Dengan menjadi manusia, Kristus menyucikan kemanusiaan dan menjadikannya bernilai ilahi. Solidaritas radikal dengan mereka yang dipangkas haknya karena kemiskinan dan keberdosaan, orang-orang yang tidak lulus seleksi sosial dan religius, adalah langkah Tuhan untuk menunjukkan komitmennya terhadap manusia, juga mereka paling gampang dilukai.⁴⁰

Upaya penyebarluasan gagasan, pembentukan hukum dan pentradisian praktik penegakan HAM mendapat dukungan dari Gereja. Gereja Katolik dikenal sebagai salah satu dari pejuang HAM dan penegakan martabat manusia dewasa ini. Namun, dewasa ini, konsep yang mulanya dianggap jelas, kembali didiskusikan. Pertanyaan yang diperdebatkan adalah: sejak kapan seorang manusia dikatakan memiliki martabat tersebut dan dalam kondisi mana martabat tersebut dapat dikatakan sudah tidak dimiliki lagi. Dampak praktis dari pertanyaan ini adalah pembenaran atau pelarangan atas aborsi dan eutanasia. Atas

³⁸ Édouard Hamel, “Fondamenti Biblico-teologici dei Diritti Umani Nella ‘Gaudium et Spes’”, dalam René Latourelle (ed.), *Vaticano II. Bilancio & Prospettive. Venticinque anni dopo 1962/1987*, Assisi: Cittadella Editrice 1987, hlm. 1001-1016.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Rodger Charles dan Drostan Maclaren, *op.cit.*, hlm. 86-91.

nama martabat manusia orang membenarkan aborsi dan eutanasia. Kenyataan ini menuntut Gereja untuk memikirkan dan mempertanggungjawabkan pandangannya mengenai keluhuran martabat manusia yang berlaku sejak pembuahan sampai kematian alamiah.⁴¹ Gereja mesti mendalami lagi pandangannya mengenai martabat manusia di hadapan praktik seperti ini.

Persoalan martabat manusia dan HAM pun diperdebatkan ketika kita berbicara mengenai hukuman mati. Atas nama HAM, terutama hak atas hidup, orang menolak hukuman mati. Namun, Gereja yang berbicara lantang mengenai martabat manusia dalam GS dan pernyataan-pernyataan yang menyusulnya, masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1992 dikatakan, “Perlindungan terhadap kesejahteraan bersama menuntut bahwa seorang pelaku kejahatan harus dihalangi untuk merugikan lagi orang lain. Atas dasar ini tradisi Gereja mengakui legalitas hak dan kewajiban kekuasaan publik yang sah untuk memberikan hukuman seturut beratnya satu pelanggaran, tanpa mengecualikan hukuman mati untuk kasus-kasus yang paling berat.” Tiga tahun kemudian, dalam *Evangelium Vitae* Yohanes Paulus II menegaskan bahwa “Kini, kasus-kasus berat itu, karena pengaturan hukuman yang semakin maju, sudah amat langka atau sama sekali tidak ada lagi”. Dengan ini hendak dikatakan bahwa hukuman mati tidak lagi memiliki alasan untuk diterapkan. Walaupun demikian, mesti dikatakan pernyataan ini tidak cukup tegas. Secara logis, jika Gereja mempertahankan ajarannya mengenai martabat manusia yang tidak dapat dirampas dengan alasan apapun, maka Gereja pun mesti secara tegas dan eksplisit menolak hukuman mati dalam ajaran-ajarannya.

Sejalan dengan semangat dasar KV II, Gereja Indonesia berusaha untuk berpartisipasi dalam penegakan HAM. Salah satu momentum penting dalam rangka penegakan hak warga untuk hidup dalam satu kondisi demokratis sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara adalah Surat KWI mengenai Pemilihan Umum pada tahun 1997. Diskusi yang meluas menanggapi pernyataan ini dalam kondisi politik Indonesia saat itu, dapat dilihat sebagai satu bukti kontribusi Gereja dalam penumbuhan kesadaran warga akan hak dasarnya untuk berpendapat dan menyampaikannya. Selain itu, lebih secara sporadis individual daripada secara formal kelembagaan, Gereja dalam diri sejumlah tokoh dan lembaga pendidikan, turut serta dalam usaha para pejuang HAM. Namun, yang patut disesalkan adalah bahwa Gereja Katolik Indonesia tidak bersuara lantang menuntut pembongkaran pelanggaran HAM selama masa Soeharto. Gereja juga bungkam menghadapi kasus pelanggaran HAM selama masa pendudukan Timor Loro Sae oleh Indonesia. Keterlibatan seorang uskup dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi bentukan pemerintah RI dan TLS yang merupakan sandiwara daripada ungkapan tekad yang jujur membongkar ketidakadilan, menunjukkan ketidakseriusan para pemimpin Gereja Katolik Indonesia terhadap masalah HAM.⁴²

2.4. Perdamaian

Tema perdamaian dunia sangat aktual ketika KV II sedang berlangsung. Ketegangan blok Timur dan Barat saat itu menjadikan setiap sumbangan pikiran dan pernyataan tekad

⁴¹ Bdk. Paul Budi Kleden, “Hukuman Mati. Antara Argumen HAM dan KAM”, dalam *Jurnal Ledalero* Vol. 5. No. 2 Desember 2006, hlm. 5-28.

⁴² Paul Budi Kleden, “Yang Benar, Yang Bersahabat? Komentar atas pembentukan KKP RI-RTL”, dalam *Pos Kupang* 20 Agustus 2005.

mengenai perdamaian yang datang dari lembaga keagamaan internasional mempunyai makna istimewa. GS mendorong semua orang Kristen untuk bekerja sama dengan semua pihak demi menegakkan perdamaian dalam keadilan dan kasih (GS 77). Kendati demikian, rumusan GS yang lebih moderat dibanding *Pacem in Terris* ini menolak segala macam perang, masih diperdebatkan pada saat terakhir menjelang penetapan dokumen ini, sebab sejumlah uskup Amerika Serikat menilainya terlampau pasifistis.⁴³

Tiga hal dapat dilihat sebagai kontribusi GS untuk perdamaian internasional. *Pertama*, soal peran lembaga-lembaga internasional. Secara cukup luas GS berbicara mengenai peran lembaga-lembaga internasional yang dibentuk untuk memajukan perdamaian dunia. GS mengimpikan satu masa dan kondisi di mana semua orang menolak perang dan memandangnya sebagai satu bentuk kebiadaban yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan peradaban dewasa ini. Namun, hal ini tidak dapat diharapkan hanya lahir dari kesadaran pribadi atau mentalitas satu generasi. Selain perlunya upaya pembentukan kesadaran dan mentalitas, dibutuhkan pula lembaga internasional, “satu otoritas dunia publik yang diakui oleh semua, yang memiliki kekuasaan yang efektif untuk dapat menjamin keamanan, keadilan dan penegakan hak-hak bagi semua orang” (GS 82). Pernyataan ini menunjukkan harapan Gereja akan peran penting sebuah lembaga internasional, sekaligus mengungkapkan ciri dari lembaga seperti itu. Dia mesti menjadi lembaga yang diakui dan diterima oleh semua pihak serta memiliki seperangkat kewenangan dan kekuasaan. Lembaga seperti ini tidak dapat hanya menjadi perpanjangan kepentingan beberapa negara kuat.⁴⁴

Kunjungan Paulus VI, Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI ke PBB menggarisbawahi keyakinan Gereja akan pentingnya lembaga ini. Demikian pula pembentukan perwakilan tetap Vatikan untuk PBB menegaskan penilaian ini. Menjadi pertanyaan, apakah PBB dalam kondisi dan strukturnya yang sekarang, dapat memenuhi harapan GS sebagaimana diungkapkan di atas? Sambil menghargai berbagai usaha yang sudah dilakukan dan prestasi yang diraih PBB, mesti dikatakan bahwa lembaga ini belum mencapai harapan GS. Demikian pula, dunia belum tiba pada situasi di mana semua orang menolak perang. Kenyataan meningkatnya jumlah perang setelah PD II menjadi bukti bahwa bagi banyak orang, tidak hanya di negara-negara berkembang, perang masih dilihat sebagai sarana yang ampuh untuk menjamin pelestarian haknya. Padahal sejarah membuktikan berulang kali bahwa perang yang satu merupakan persiapan bagi perang berikut. Keputusan satu pemerintahan untuk mendukung secara militer dan mempersenjatai kubu yang satu, merupakan persiapan untuk harus menghadapinya kemudian sebagai musuh yang menuntut persenjataan kelompok baru.

Di Indonesia, yang kita hadapi adalah konflik yang disebabkan oleh gerakan pembebasan sejumlah wilayah sebagai akibat dari penindasan yang dialami. Kalau Aceh sudah menemukan solusinya kendati pasti tetap belum maksimal, yang masih merupakan soal besar adalah Papua. Dalam kasus yang masih tetap memakan korban nyawa manusia ini, sejumlah kalangan dalam Gereja Katolik seperti JPIC OFM dan Pastor John Djonga terlibat membela kepentingan rakyat Papua. Lembaga resmi Gereja Katolik yakni KWI

⁴³ Charles Moeller, “Die Geschichte”, *op.cit.*, hlm. 276. Argumen yang disampaikan pada uskup ini adalah: apabila perang secara radikal ditolak, maka sikap seperti ini dapat menghalangi sejumlah pemerintahan yang justru melihat perang sebagai cara yang paling tepat untuk melindungi kemaslahatan warga dunia.

⁴⁴ Rodger Charles dan Drostan Maclaren, *op.cit.*, hlm. 256-260.

baru berbicara pada tahun 2011 dalam sebuah siaran pers mendesak pemerintah RI untuk mencari solusi damai untuk tanah Papua.

Kedua, masalah perdamaian internasional dan keadilan. Dalam GS Gereja menegaskan pandangannya bahwa perdamaian adalah buah dari keadilan. Tidak ada perdamaian apabila tidak ada keadilan. Tantangan untuk menciptakan dan menjaga perdamaian adalah ketidakadilan struktural yang terkandung di dalam sistem ekonomi, politik, budaya dan agama. Perjuangan Gereja untuk mengusahakan, menegakkan dan menjamin perdamaian akan selalu bersentuhan dengan struktur-struktur yang menimba keuntungan dan ketidakadilan struktural yang diciptakan.

Salah satu jalan untuk mengatasi masalah ketidakadilan khususnya dalam kaitan dengan kesenjangan kesejahteraan adalah pembangunan. Pembangunan dilihat sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok yang miskin dan terpinggirkan. Dalam *Populorum Progressio* Paulus VI mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan adalah nama lain bagi perdamaian. Namun, pembangunan tersebut mesti sungguh disertai aspek pemerataan, keadilan dan perhatian terhadap daya tahan lingkungan. Sebab itu, perhatian Gereja semakin besar diberikan kepada persoalan-persoalan ini. Jika tidak, pembangunan hanya menghasilkan ketidakadilan baru. Advokasi kepada masyarakat miskin dan kaum minoritas menjadi pilihan Gereja dalam pendekatan pembangunan. Dalam semangat ini, Gereja Indonesia menyatakan tekadnya untuk menjadikan pendampingan para buruh dan migran sebagai salah satu prioritasnya dalam SAGKI 2005.

Ketiga, intervensi politis Gereja. Dalam proses penyusunan GS, tampak bahwa nasionalitas dapat turut mempengaruhi pandangan para peserta konsili. Para peserta dari USA, misalnya mendesak agar rumusan mengenai perang dimodifikasi sehingga tidak terlampaui membatasi kemungkinan intervensi Amerika.⁴⁵ Pengaruh seperti ini masih tampak dalam perjalanan selanjutnya. Ketika pada tahun 1979 para uskup USA memulai proses untuk membuat pernyataan tentang perang, pernyataan yang jauh lebih tajam dan jelas menolak perang, para rekan mereka di Eropa justru berpikir lain. Sebab itu, untuk mempertemukan kedua kelompok ini, Vatikan mengumpulkan para utusan uskup USA dan Eropa untuk mendiskusikan bersama sikap Gereja. Sikap Gereja-gereja lokal mesti dapat melampaui kepentingan negara dan bangsa sendiri dan terarah kepada kepentingan seluruh umat manusia. Alasan yang sama mendorong Yohanes Paulus II mengundang utusan para uskup Argentina dan Inggris ketika sedang berlangsung perang Malvinas.⁴⁶ Pemikiran yang sama pula mendorong Benediktus XVI untuk menyelenggarakan Sinode Afrika II dengan tema rekonsiliasi, keadilan dan perdamaian. Dokumen final sinode ini dipublikasikan di bawah judul: *Africae munus: The Church in Africa in Service to Reconciliation, Justice and Peace* (2011).

Partisipasi Gereja dalam perdamaian menuntutnya untuk melampaui ikatan emosional kebangsaan. Betapa sulitnya tuntutan ini dapat dilihat dalam sikap dan keterlibatan Gereja dalam perang antarsuku dan negara di Afrika dalam beberapa dekade terakhir. Kita pun dapat mengatakan, ketidaktegasan atau lebih tepat sikap diam Gereja Indonesia berhadapan dengan masalah di Timor Leste, Aceh dan Papua pun merupakan bukti dari

⁴⁵ Charles Moeller, "Die Geschichte", *op.cit.*, hlm. 276.

⁴⁶ Joseph Joblin, "Insegnamento sulla Pace della Gaudium et Spes", dalam Renè Latourelle, (ed.), *Vaticano II. Bilancio & Prospettive. Venticinque anni dopo 1962/1987*, Assisi: Cittadella Editrice 1987, hlm. 1475-1478.

jebakan nasionalisme ini. Kita dituntut untuk menjadi Gereja Indonesia, namun ini tidak berarti kita membenarkan segala tindakan dan sikap negara dan pemerintah yang menindas. Peringatan Mangunwijaya bagi setiap orang Indonesia yang dewasa kiranya berlaku pula untuk Gereja Indonesia, agar kita tidak terjebak dalam pandangan: *Right or wrong our country*. Gereja dipanggil untuk menjadi nabi, dan itu berarti, mengikuti sang Guru dari Nazaret yang berani mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar.

Penutup

Membaca GS orang mendapat kesan bahwa dokumen ini sangat kaya dan inspiratif. Dan memang dia menginspirasi banyak lembaga dan pribadi untuk mengambil langkah yang menunjukkan keberpihakan dan keberpijakan Gereja dalam dunia. Dokumen ini pun menjadi referensi bagi banyak dokumen pasca konsili yang berbicara mengenai komitmen sosial politik Gereja. Jika kita melihat berbagai praksis Gereja dan menghadapkannya pada berbagai dokumen, termasuk dan terutama GS, maka kita mesti mengatakan bahwa kita masih sangat jauh dari ideal yang dituangkan dalam berbagai dokumen. Bukan mustahil orang pun berpendapat, kita tidak butuhkan lagi beragam dokumen. Yang utama adalah praksis. Kendati demikian, justru saat berhadapan dengan KV II, kebutuhan akan perumusan gagasan dalam dokumen menjadi sangat penting, sebab ada tendensi di dalam Gereja sendiri untuk meredam semangat pembaruan yang dilansirnya. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai gema dan dampak dari GS, kita selalu menunjuk pada sejumlah dokumen dan melihat sejumlah praksis. Dan dapat dikatakan, kendati tidak selalu mudah, namun nafas GS masih tetap mengembus dan memotori banyak orang dan kelompok di berbagai belahan dunia untuk menunjukkan bahwa “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat manusia pada masa ini, teristiwanya mereka yang miskin dan terpinggirkan, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus”.

Daftar Rujukan:

Benediktus XVI, *Caritas in Veritate*, 2009.

Borgman, Eric. “Gaudium et Spes: the Forgotten Future of the Revolutionary Document”, dalam *Concilium* 2005.

Hame, Édoard. “Fondamenti Biblico-teologici dei Diritti Umani Nella ‘Gaudium et Spes’”, dalam René Latourelle (ed.), *Vaticano II. Bilancio & Prospettive. Venticinque anni dopo 1962/1987*, Assisi: Cittadella Editrice 1987.

Hines Mary E. “North America ‘Impulses’ following Vatican II” dalam *Concilium* 2012.

Joblin Joseph, “Insegnamento sulla Pace della Gaudium et Spes”, dalam René Latourelle (ed.), *Vaticano II. Bilancio & Prospettive. Venticinque anni dopo 1962/1987*, Assisi: Cittadella Editrice 1987.

Kleden, Paul Budi. “Radikalitas yang Inspiratif: Membaca Pakta Katakombe Para Uskup”, dalam *Berbagi* 2/1/2013.

_____. “Hukuman Mati. Antara Argumen HAM dan KAM”, dalam *Jurnal Ledalero* 5/2/2006.

Legrand, Hervé. “Forty Years Later: What has become of the Reforms?” dalam *Concilium* 2005.

- Maier, Martin. "Vatican II: Inspiration and Encouragement for the Church in Europe", dalam *Concilium* 2012.
- Moeller, Charles. "Das Prooemium, Komentar", dalam Heinrich Suso cs (eds.), *Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare*, Freiburg: Herder 1968.
- _____. "Die Geschichte der Pastoralkonstitution", dalam Heinrich Suso cs (eds.), *Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare*, Freiburg: Herder 1968.
- Oscar Beozzo Josè, "Vatican II Fifty Years Later in Latin America and the Caribbean", dalam *Concilium* 2012.
- Pontifical Council for Justice and Peace, *Vocation of the Business Leader. A Reflection*, Roma: Pontifical Council for Justice and Peace, 2012.
- Rodger Charles dan Drostan Maclaren, *The Social Teaching of Vatican II. Its Origin and Development*, Oxford: Plater Publications, San Fansisco: Ignatius Press 1982.
- Sobrino John, "The 'Church of the Poor' did not Prosper at Vatican II" dalam *Concilium* 2012.
- Sullivan, Francis A. "Development in Teaching Authority Since Vatican II", dalam *Theological Studies* 73/2012.
- Trisco, R. dan J. Komonchak. "Second Vatican Ecumenical Council. A Synthetic Overview", dalam *SEDOS* 43/9/10/2011.
- Wilfred Felix, "The Reception of Vatican II in a Multireligious Continent", dalam *Concilium* 2012.
- http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sinodo_indice_en.html. diunduh pada tanggal 21 Januari 2013.
- <http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-reflection-on-vatican-ii-part-1-4>, diakses tanggal 20 Februari 2013.